



# BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703  
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : [info@bmkg.go.id](mailto:info@bmkg.go.id)

Nomor : KP.04.04/088/KRU/VI/2021 Jakarta, 04 Juni 2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Himbauan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN

- Yth. **1. Inspektur**  
**2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan**  
**3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan**  
**4. Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika**  
**5. Kepala Balai Besar Wilayah I s/d V MKG**  
**6. Kepala Unit Pelaksana Teknis**

di

Tempat

Menindaklanjuti surat Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI nomor S-70/PB.7/2021 tentang Pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan Pejabat Fungsional APK APBN dan Pejabat Fungsional PK APBN yang telah diangkat melalui mekanisme *Inpassing* atau Penyetaraan Jabatan/*Delayering*, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional APK APBN dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN melaksanakan pelatihan fungsional jabatan tersebut.;
2. Ketentuan terkait mekanisme pendaftaran, jadwal kegiatan pelatihan fungsional, dan panduan teknis terkait kegiatan pelatihan fungsional APK APBN dan PK APBN ada pada lampiran surat ini;

3. Sehubungan dengan pentingnya pelatihan fungsional tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat mendorong dan meneruskan informasi ini kepada pegawai di unit kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/ Ibu, diucapkan terima kasih.



**Kepala Biro Umum dan  
Sumber Daya Manusia,**

**Petrus Demon Sili**

Tembusan :  
Sekretaris Utama (sebagai laporan)



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III, JALAN BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710; TELEPON: 021-3449230  
INTERN 5660, (021) 3849670; FAKSIMILE (021) 3849670; LAMAN: WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-70/PB.7/2021 18 Mei 2021  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pelaksanaan Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN

Yth. Terlampir

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengangkatan Pejabat Fungsional ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN (APK APBN) dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN (PK APBN) melalui mekanisme Penyesuaian (*Inpassing*) dan Penyetaraan (*Delayering*), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pejabat Fungsional APK APBN dan PK APBN wajib mengikuti pelatihan fungsional paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam jabatan fungsional.
2. Terkait dengan hal pada angka 1 (satu) di atas, Kementerian Keuangan selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional APK APBN dan Jabatan Fungsional PK APBN telah menyiapkan kurikulum dalam rangka kegiatan pelatihan fungsional yang hanya dapat diikuti oleh Pejabat Fungsional APK APBN dan Pejabat Fungsional PK APBN yang telah diangkat melalui mekanisme *Inpassing* atau Penyetaraan Jabatan/*Delayering*.
3. Ketentuan terkait mekanisme pendaftaran, jadwal kegiatan pelatihan fungsional, dan panduan teknis terkait kegiatan pelatihan fungsional APK APBN dan PK APBN dapat diakses melalui laman <http://bit.ly/elearning-JF-Perbendaharaan-2021>.
4. Sehubungan dengan pentingnya pelatihan fungsional tersebut dimohon bantuan Saudara/i untuk dapat menginformasikan dan mendorong para Pejabat Fungsional APK APBN dan Pejabat Fungsional PK APBN lingkup Kementerian/Lembaga Saudara untuk mengikuti kegiatan pelatihan fungsional dimaksud dengan mengisi formulir pendaftaran pelatihan fungsional sebagaimana tertera pada laman informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Sistem Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik  
Agung Yulianta

Tembusan:

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan





Lampiran  
Surat Direktur Sistem Perbendaharaan  
Nomor : [S-70/PB.7/2021](#)  
Tanggal : [18 Mei 2021](#)

Yth. 1. Kepala Biro Keuangan Kementerian Negara/Lembaga  
2. Kepala Biro SDM/Kepegawaian Kementerian Negara/Lembaga

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi
4. Mahkamah Agung
5. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
6. Badan Pengawasan Pemilihan Umum
7. Kementerian Kesehatan
8. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
9. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
10. Kementerian Perhubungan
11. Badan Narkotika Nasional
12. Badan Standardisasi Nasional
13. Badan Kepegawaian Negara
14. Badan Keamanan Laut
15. Badan Pemeriksa Keuangan
16. Kementerian Sekretariat Negara
17. Kementerian Kelautan Dan Perikanan
18. Badan Riset dan Inovasi Nasional
19. Badan Pusat Statistik
20. Kementerian Keuangan
21. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
22. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
23. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24. Badan Meteorologi dan Geofisika
25. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26. Kementerian Komunikasi dan Informatika
27. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
28. Badan Informasi Geospasial
29. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
30. Kejaksaan Republik Indonesia
31. Badan Pengawas Obat dan Makanan
32. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
33. Komisi Yudisial Republik Indonesia
34. Kementerian Dalam Negeri
35. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
36. Badan Koordinasi Penanaman Modal



37. Kementerian Perdagangan
38. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
39. Kementerian Agama
40. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
41. Ombudsman Republik Indonesia
42. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
43. Badan Pengawasan dan Pembangunan
44. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
45. Kementerian Koordinasi Bidang Kematriman
46. Lembaga Administrasi Negara
47. Kementerian Pemuda dan Olahraga
48. Kementerian Pertanian
49. Kementerian Perindustrian
50. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
51. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
52. Badan Tenaga Nuklir Nasional
53. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
54. Kementerian Sosial
55. Kementerian Ketenagakerjaan
56. Komisi Pemilihan Umum
57. Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional
58. Arsip Nasional Republik Indonesia
59. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
60. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
61. Dewan Ketahanan Nasional
62. Lembaga Ketahanan Nasional
63. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
64. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
65. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi